

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap implementasi Kios Adminduk di Kabupaten Jepara melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain *embedded single-case study* (Yin, 2018), penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan yang menjawab rumusan masalah secara berurutan.

Pertama, proses politik transformasi digital Kios Adminduk di tingkat desa berlangsung melalui tiga dimensi yang saling berinteraksi. Dalam dimensi *Technology Enactment* (Fountain, 2001), teknologi tidak hadir secara seragam melainkan dibentuk ulang oleh konteks politik lokal masing-masing desa, di mana struktur institusional formal berinteraksi dengan mekanisme adaptif informal yang lahir dari kebutuhan lapangan. Relasi kekuasaan mengalami redistribusi signifikan karena digitalisasi memutus rantai percaloan yang sebelumnya merugikan masyarakat. Dalam dimensi *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008), kolaborasi multi-level antara Disdukcapil, kecamatan, dan pemerintah desa menjadi tulang punggung keberlanjutan program, dengan kepemimpinan fasilitatif kepala desa yang kontekstual sebagai faktor pembeda utama antar desa. Dalam dimensi *Politik Inovasi Digital* (Mergel, 2016), resistensi birokrasi lebih bersifat struktural dan tersembunyi daripada formal, sementara kapasitas politik berevolusi dari mekanisme *top-down* pada fase awal menjadi *bottom-up* setelah legitimasi program terbukti.

Kedua, proses politik transformasi digital Kios Adminduk berdampak signifikan terhadap efisiensi pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa dalam tiga dimensi. Waktu penyelesaian dokumen yang sebelumnya membutuhkan sehari-hari hingga berminggu-minggu berhasil dipangkas menjadi satu hingga tiga hari kerja. Prosedur pelayanan yang sebelumnya bersifat multi-lokasi dan manual bertransformasi menjadi satu pintu berbasis digital di tingkat desa. Aksesibilitas layanan meningkat secara inklusif, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak melek teknologi, sekaligus mengeliminasi praktik pungutan liar melalui transparansi sistem digital. Pencapaian efisiensi ini merupakan *outcome* dari proses politik yang berhasil dikelola, bukan semata-mata hasil adopsi teknologi. Penelitian ini juga menghasilkan dua kontribusi teoritis: pertama, memodifikasi proposisi Mergel (2016) bahwa dalam konteks masyarakat desa Indonesia legitimasi *output* dan *throughput* lebih determinan daripada legitimasi *input*; kedua, memperluas argumen Fountain (2001) bahwa integritas aktor lebih menentukan keberhasilan *technology enactment* daripada kapasitas teknis semata.

Ketiga, tantangan yang dihadapi Kios Adminduk bersifat tri-dimensional. Tantangan teknis berupa gangguan jaringan internet dan keterbatasan akses simultan aplikasi diatasi secara adaptif melalui protokol layanan berbasis WhatsApp di tingkat desa, meskipun keterbatasan akses simultan masih memerlukan intervensi kebijakan kabupaten. Tantangan administratif berupa perubahan regulasi yang tidak tersosialisasi merata dan kasus pelanggaran integritas operator di Desa Krapyak menunjukkan

bahwa mekanisme koreksi institusional berfungsi, meskipun membutuhkan momentum politik yang tepat untuk bergerak. Tantangan sosial berupa disparitas literasi digital dan sosialisasi yang belum merata mengindikasikan perlunya penguatan jaringan sosialisasi hingga tingkat rumah tangga, mengingat kelompok yang paling membutuhkan layanan justru seringkali paling jauh dari informasi tentang program ini.

4.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara jujur sebagai bagian dari reflektivitas ilmiah dan sebagai pijakan bagi penelitian selanjutnya.

Pertama, terdapat keterbatasan data akibat hilangnya rekaman pada beberapa sesi wawancara di Desa Tahunan, sehingga sebagian analisis pada unit analisis tersebut lebih banyak bersandar pada catatan lapangan daripada transkripsi wawancara yang lengkap. Hal ini berpotensi mengurangi kedalaman analisis pada unit analisis dimaksud.

Kedua, perspektif Disdukcapil sebagai aktor utama di level kabupaten tidak terwakili secara langsung melalui wawancara dalam penelitian ini, sehingga analisis pada dimensi kebijakan kabupaten lebih banyak dibangun dari perspektif aktor desa dan kecamatan. Keterlibatan langsung Disdukcapil sebagai informan berpotensi menghasilkan analisis yang lebih berimbang.

Ketiga, penelitian ini tidak mengukur dampak efisiensi secara kuantitatif sehingga klaim percepatan waktu pelayanan dan peningkatan

aksesibilitas masih bersifat persepsional berdasarkan pengakuan informan. Pengukuran kuantitatif yang lebih sistematis akan memperkuat validitas temuan tentang dampak efisiensi.

Keempat, penelitian ini dilakukan pada satu titik waktu sehingga tidak dapat menangkap dinamika perubahan program secara longitudinal, terutama dalam konteks pergantian kepemimpinan desa yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan program.

4.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, penelitian ini merumuskan saran yang ditujukan kepada tiga pihak.

Kepada Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Disdukcapil, disarankan untuk memperkuat infrastruktur jaringan internet di seluruh lokasi Kios Adminduk, memperbaiki mekanisme sosialisasi perubahan regulasi agar lebih merata dan tepat waktu ke tingkat desa, serta meningkatkan pengawasan proaktif terhadap integritas operator sebagai upaya pencegahan pelanggaran sejenis di masa mendatang.

Kepada pemerintah desa, disarankan untuk memperkuat sosialisasi program secara berkelanjutan melalui jaringan RT/RW dan tokoh masyarakat, tidak hanya pada fase peluncuran awal, serta membangun mekanisme suksesi yang memastikan keberlanjutan program tidak bergantung pada komitmen personal kepala desa semata.

Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka beberapa agenda penelitian lanjutan yang relevan. Penelitian komparatif antar

kabupaten dengan karakteristik demografis dan kapasitas fiskal yang berbeda akan memperkuat generalisasi temuan. Penelitian longitudinal yang mengikuti dinamika program dalam beberapa siklus kepemimpinan desa diperlukan untuk menguji keberlanjutan program pasca pergantian pemimpin. Selain itu, penelitian yang melibatkan Disdukcapil secara langsung sebagai informan akan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif tentang dinamika kebijakan di level kabupaten.